BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Rumusan Masalah

Uang yang dikeluarkan oleh BI pada saat ini merupakan alat pembayaran yang sah. Sebelum Indonesia meraih kemerdekaan, Indonesia masih tidak mempunyai bank sentral atau pusat. Pada masa tersebut, peran bank sentral atau pusat hanya sebatas sebagai bank sirkulasi, fungsi bank sirkulasi tersebut dilakukan oleh *DeJavasche BankNV* yang diberikan haknya untuk mencetak dan mendistribusikan Uang Belanda oleh Oktrrooi pada tahun 1827.

Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia diumumkan, dalam Bab VII Pasal 23 UUD 1945 dikatakan didirikan suatu bank pusat yang diberi nama BI dengan tugasnya mengatur pengedaran dan mengeluarkan uang di Indonesia. Pada rapat Dewan Menteri yang berlangsung pada tanggal 19 September 1945, Pemerintah memutuskan Untuk membentuk sebuah bank sirkulasi yang akan beroperasi sebagai bank yang dimiliki oleh negara. Dalam konteks tersebut, langkah pertama yang harus diambil adalah pendirian yayasan yang diberi nama Pusat Bank Indonesia. Yayasan tersebut adalah awal mula terbentuknya BNI.

Pada tahun 1949, diadakan Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag yang membahas masalah perbankan. Pada saat itu, utusan pemerintah menghadapi kesulitan dalam mencari solusi agar Bank Negara Indonesia (BNI) yang telah didirikan sejak tahun 1946 dan ditetapkan sebagai Bank Sentral RIS dapat diterima sebagai bank sentral atau pusat oleh pemerintah Indonesia. Akibatnya, pemerintah Indonesia kemudian terpaksa menerima *DeJavasche Bank* sebagai bank pusat. Kemudian, pada tanggal 6 Desember 1951, diterbitkan undang-undang yang mengatur tentang *DeJavasche Bank* sebagai bank sentral.

Pada tanggal 1 Juli 1953, diterbitkan Undang-undang Nomor 11 tahun 1953 yang menggantikan *Javasche Bankk* Wet Tahun 1922. Undang-undang ini berjudul "Pokok Bank Indonesia". Sebagai hasil dari perubahan ini, Bank Indonesia didirikan sebagai satu-satunya bank sentral di Indonesia. Sejak terbentuknya BI sebagai bank pusat sampai tahun 1968, Selain bertanggung jawab dalam memperedarakan uang di masyarakat, menjaga stabilitas moneter, dan mengembangkan sistem perbankan, BI juga melakukan beberapa fungsi yang biasanya dilakukan oleh bank komersil. Namun, keputusan dan tanggung jawab terkait kebijakan moneter ada di tangan pemerintah melalui pembentukan Dewan Moneter. Dewan Moneter memiliki tugas untuk memilih dan menentukan kebijakan moneter yang akan dilaksanakan oleh Bank Indonesia.¹

Melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968, pada tahun 1968, BI tidak lagi menjalankan fungsi ganda karena beberapa fungsi yang sebelumnya dilakukan oleh bank komersial telah dihapus. Namun demikian, tugas BI sebagai suatu agen pembangunan di Indonesia masih ada. Tidak hanya itu, Tetap dipertahankannya peran Dewan Moneter sebagai lembaga pembuat kebijakan yang bertanggung jawab dalam merumuskan kebijakan moneter. Tugas BI sebagai agen pembangunan terdapat pada tugasnya, yaitu : *pertama*, Memelihara dan menjaga stabilitas nilai mata uang Rupiah; dan *kedua*, memperlancar pembangunan dan produksi, serta lapangan untuk kerja guna menaikkan ekonomi masyarakat.²

Selanjutnya, diterbitkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999, posisi BI sebagai Bank sentral atau pusat RI telah dipertegas. Dalam hal ini, BI memiliki kedudukan yang serupa dengan bank-bank lain di beberapa negara seperti Chili, Jepang, dan Korea.³

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999, BI dinyatakan sebagai suatu badan hukum. Dengan itu, BI mempunyai otoritas untuk

¹Neni Sri Imaniyati, 2010, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, h. 67

²*Ibid.*,h. 68

³*Ibid.*,h. 68

menjalankan perbuatan hukum termasuk pengelolaan kekayaan sendiri terlepas dari APBN Indonesia. Selain itu, BI juga memiliki wewenang untuk mengeluarkan peraturan bagi rakyat umum yang harus mematuhi peraturan yang berlaku sesuai dengan kewenangannya, dan bertanggung jawab atas tindakan mereka baik di dalam maupun di luar pengadilan.⁴

Pada tahun 1999 Bank Indonesia telah memiliki wewenang dan tugas untuk memelihara dan mencapai kestabilan nilai mata uang rupiah. Tugas tersebut telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Kemudian, perubahan dilakukan terkait Undang-Undang BI. Pertama, pada tahun 2004, Undang-Undang tentang BI diamandemen dengan dilihat pada aspek yang berkaitan dengan wewenang dan tugas BI. Perubahan berikutnya terjadi pada tahun 2008, ketika pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999. Dalam perubahan tersebut, BI juga diberikan peran sebagai jalan dari upaya untuk menjaga stabilitas sistem keuangan di Indonesia.

Bersamaan dengan pasar saham, dana pensiun, asuransi, dan industri lainnya, industri perbankan merupakan salah satu subsektor utama sektor keuangan. Saat ini perbankan berperan besar dalam mendorong stabilitas sistem keuangan Indonesia. Hal ini disebabkan meskipun telah tersedia alternatif investasi finansial seperti saham di pasar saham, asuransi, dana pensiun, obligasi, dan lain-lain, sebagian besar masyarakat dan perusahaan non finansial masih memilih untuk menyimpan kelebihan dananya dalam bentuk tabungan, deposito, dan giro di bank.

Meski ada opsi lain, seperti melepas saham atau obligasi di pasar modal, antara lain bisnis dan perorangan yang membutuhkan uang masih mengandalkan pinjaman bank sebagai sumber pembiayaan. Hal ini menunjukkan bahwa perbankan masih menjadi bagian integral dalam sistem keuangan Indonesia.

⁴*Ibid.*,h. 69

Bank berfungsi sebagai jembatan keuangan bagi masyarakat, antara individu dengan uang tambahan dan orang lain yang membutuhkan uang. Di Indonesia, lembaga perbankan merupakan salah satu jenis lembaga yang berusaha membantu pelaksanaan pembangunan nasional dengan mendorong pertumbuhan, pemerataan, dan stabilitas ekonomi pada tingkat nasional, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi bagi seluruh masyarakat.⁵

Melihat sejarah perbankan di atas, tidak dapat dipungkiri lagi Uang merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan transaksi. yang wajib dimiliki semua orang dalam melakukan jual beli pada masa dahulu, namun sekarang masyarakat sudah mulai terbantu dengan adanya alat pembayaran lain yaitu *e-money* yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik.

Pada saat ini sudah tersedia berbagai macam pelayanan untuk transaksi berupa *e-money*, dimana masyarakat tidak lagi susah payah membawa uang tunai untuk menjalankan suatu transaksi jasa atau barang. Bentuk dari *e-money* mempunyai berbagai variasi, berupa kartu ataupun yang berbentuk pulsa pada telepon dan juga bisa berupa suatu aplikasi. Nominal yang tersimpan pada uang elektronik tersebut berfungsi seperti uang dan dapat dipakai sebagai alat pada saat melakukan transaksi. Masyarakat bisa mengisi nilai saldo pada uang elektronik tersebut dengan melakukan top up atau memindahkan dana dari rekening bank miliknya ke saldo uang elektronik tersebut melakukan *top up* secara tunai pada pihak yang menyediakan dan melayani *top up* uang elektronik. *E-money* menjadi bentuk pembayaran yang diakui secara luas untuk barang dan jasa termasuk parkir, makan, dan tol. Orang dapat dengan mudah melakukan transaksi yang melibatkan uang dalam jumlah kecil berkat *e-money* tanpa perlu memikirkan ketersediaan uang kembalian.

Peraturan mengenai penggunaan uang elektronik di Indonesia diatur pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik.

⁵*Ibid.*,h. 14

Barulah kini pembayaran menggunakan *e-money* dipakai banyak bank di Indonesia, milik negara ataupun swasta.

Saldo *e-money* yang disimpan secara digital dalam sebuah chip, kartu, dan alat lainnya membuat masyarakat lebih mudah dalam bertransaksi. Pemakaian uang elektronik tersebut dapat dipakai untuk bayar tiket transportasi umum, tol, transaksi di toko atau merchant lain yang melakukan kerja sama dengan penerbit *e-money* tersebut. *E-money* dapat dianggap sebagai metode pembayaran yang sangat praktis, karena masyarakat hanya perlu mengisi saldo dari rekening atau melakukan *top up* ke dalam media uang elektronik. Selain itu, uang elektronik juga dapat meningkatkan efisiensi, karena masyarakat tidak perlu repot membawa jumlah uang tunai yang besar.

Munculnya *e-money* menimbulkan berbagai masalah salah satu masalahnya adalah gugatan terkait penggunaan *e-money* di jalan tol ke Mahkamah Konstitusi, kasusnya adalah sebagai berikut:

Warga Bogor bernama Muhammad Hafidz menyuarakan ketidaksetujuannya terhadap metode pembayaran tol elektronik. Ia dan kuasa hukumnya mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi dengan alasan metode pembayaran e-toll merugikan pelanggan. Perkara tersebut tercatat dengan nomor registrasi 91/PUU-XV/17. Muhammad Hafidz memberikan izin kepada pengacaranya, Eep Ependy untuk membawa aksi tersebut. Hafidz menggugat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam salinan gugatannya. Hafidz mengatakan dalam salinan pengaduannya yang diterima detik.com pada Senin, 6/11/2017, pelaku dapat secara sepihak memilih bentuk pembayaran atas produk atau layanan yang disediakan jika pemohon tidak memiliki hak untuk memilih cara memperolehnya. atau menggunakan barang atau jasa yang ingin dimilikinya. Salah satu pendekatannya adalah dengan mengamankan penggunaan uang elektronik (*e-money*) oleh nasabah.

Hafidz mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi agar Pasal 8 juga mencakup hak konsumen untuk memilih metode pembayaran. Saat ini,

Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen hanya mengatur prosedur untuk mendapatkan barang, namun tidak mencakup aspek pembayaran.

"Pemohon merasa terpaksa oleh penyelenggara jalan tol untuk menggunakan *e-money* sebagai satu-satunya metode pembayaran, tanpa diberikan hak untuk memilih cara pembayaran lainnya," ungkapnya.

Pelapor menganggap tidak adil jika pengelola jalan tol menggunakan pembayaran uang elektronik. Klaimnya, karena pelanggan tidak diberi pilihan untuk menggunakan metode pembayaran lain, maka bisa jadi pelaku usaha lain akan mengikuti.

Hafidz memperhatikan perbedaan tersebut dengan industri parkir yang menerapkan pembayaran dengan uang elektronik, tetapi tetap memberikan pilihan kepada konsumen untuk membayar menggunakan uang kertas atau logam.⁶

Dengan mengacu pada informasi yang telah dijelaskan sebelumnya, judul penelitian ini adalah: "Perlindungan Hukum Konsumen Pengguna Jasa Pembayaran Uang Elektronik". Adapun rumusan masalah yang dibahas adalah :

1. Bagaimana Karakteristik dari Uang Elektronik ?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Konsumen Pengguna Jasa Pembayaran Uang Elektronik?

B. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui dan menganalisa Karakteristik dari Uang Elektronik.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa Perlindungan Hukum Konsumen Pengguna Jasa Pembayaran Uang Elektronik.

⁶ Rivki, Pembayaran E-Money di Tol Digugat Warga Bogor ke MK, <https://news.detik.com/berita/d-3715565/pembayaran-e-money-di-tol-digugat-warga-bogor-ke-mk>, 2017, diakses pada tanggal 12 Juni 2019

C. Manfaat Penulisan

1. Teoritik

Memberikan kontribusi secara umum dalam pertumbuhan studi hukum, khususnya di bidang hukum perbankan terkait dengan penggunaan uang elektronik, dengan tujuan untuk melengkapi diskusi di kalangan akademisi.

2. Praktis

Hasil penelitian ini akan memberikan masukan bagi masyarakat guna penyempurnaan aturan terkait dengan uang elektronik, sehingga diharapkan mampu memberikan pengetahuan mengenai perlindungan hukum konsumen pengguna jasa pembayaran uang elektronik sehingga memberikan keamanan bagi para pengguna apabila kepastian hukum dan perlindungan konsumen tercapai dan pengguna merasa aman, serta memberikan masukan kepada pemerintah.

D. Kerangka Konseptual

1. Fungsi Perbankan dan Tugas Bank Indonesia.

Menurut kamus hukum Focckema Anddreae bank adalah Seseorang atau lembaga yang menjalankan suatu perusahaan dalam melakukan transaksi keuangan, baik dalam penerimaan maupun pengeluaran uang kepada pihak ketiga. Terkait dengan penggunaan cek, yang hanya dapat diberi kepada bank sebagai penerima pembayaran. maka dalam pengertian luas Bank merupakan institusi atau individu yang bertugas menyediakan dana kepada pihak ke-tiga.⁷

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, Bank adalah suatu entitas bisnis di sektor keuangan yang bertanggung jawab dalam penerbitan dan penarikan uang di masyarakat, dengan fokus utama pada memberikan layanan dan kredit dalam hal pembayaran dan peredaran mata uang rupiah di Indonesia.⁸

⁷Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, cet. II, Rajawali Pers, Jakarta, h. 25.

⁸*Ibid.*, h. 26.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang mengubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang dikenal sebagai Undang-Undang Perbankan, definisi perbankan dijelaskan dalam Pasal 1(1). Menurut Pasal tersebut, perbankan mencakup segala hal yang terkait dengan bank, termasuk kegiatan usaha, struktur organisasi, dan prosedur yang digunakan dalam menjalankan kegiatan usaha perbankan. Sementara itu, Pasal 1(2) mengartikan bank sebagai suatu entitas bisnis Ia berusaha memperkuat ekonomi lokal dengan mengumpulkan uang dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan mendistribusikannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya.⁹

Berdasarkan definisi yang tercantum dalam Pasal 1(2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang mengubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, fungsi Bank dapat dijelaskan sebagai yang menyatukan perantara keuangan antara individu atau nasabah yang memiliki dana surplus dengan pihak yang membutuhkan dana. Bank menerima berbagai jenis simpanan seperti tabungan, deposito, giro, dan sertifikat deposito. Selanjutnya, bank mengelola simpanan ini dengan memberikan kredit atau pembiayaan syariah berdasarkan prinsip bagi hasil. Selain itu, bank juga melakukan investasi dalam bentuk surat-surat berharga seperti reksadana dan instrumen keuangan lainnya.¹⁰

Penjelasan di atas membawa pada kesimpulan bahwa, terlepas dari bentuk hukumnya, baik badan hukum maupun perorangan, industri perbankan merupakan kegiatan simpan pinjam yang dilakukan untuk kepentingan pihak ketiga. Undang-undang perbankan sebelumnya, seperti UU No. 14 Tahun 1967 tentang dasar-dasar perbankan, memiliki istilah ini. Bank didefinisikan oleh undang-undang sebagai badan keuangan yang fungsinya menawarkan jasa keuangan, memberikan kredit untuk pembayaran, dan memfasilitasi pergerakan uang di Indonesia.

⁹Theodosia Yovita, 2005, "Kejahatan Korporasi Dalam Hukum Perbankan Indonesia", *Perspektif Volume X*, Nomor 2 Tahun 2005, April, 2005, h. 140.

¹⁰Endang Retnowati, 2022, "Penegakan Hukum dan bentuk *Fraud* Dalam Kegiatan Usaha Bank", *Perspektif Volume 27*, Nomor 1 Tahun 2022, Januari, 2022, h. 50

Lembaga keuangan pada dasarnya adalah organisasi yang mengirimkan dan menarik dana publik melalui operasi sektor keuangan.¹¹

Sejak Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan diterbitkan, terdapat definisi yang lebih jelas mengenai bank. Menurut pasal 1 ayat 1 undang-undang tersebut, bank didefinisikan sebagai badan usaha yang mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk meningkatkan perekonomian. Dengan demikian, undang-undang ini memberikan pengertian yang tegas tentang fungsi bank sebagai penyimpan dana masyarakat dan penggerak perekonomian rakyat.¹²

Fungsi Perbankan adalah sebagai berikut :

1. Lembaga untuk menitipkan perak atau emas;
2. Melakukan konversi mata uang antara negara-negara sesuai permintaan para pedagang dan mencatatnya sebagai kewajiban dalam rekening berjalan, yang berarti suatu rekening yang dapat menerima penyeteroran baru dan ditarik oleh pemilik rekening pada waktu tertentu melalui pengurangan saldo rekening tersebut. Jenis rekening ini dikenal sebagai rekening koran, rekening giro, atau *demand deposit account* atau *current account*.
3. Pemegang kas dari suatu pemegang rekening.
4. Pengelolaan uang yang ditempatkan oleh nasabah dalam bentuk deposito. Dana yang dihimpun oleh bank digunakan secara produktif dengan memberikan pinjaman kepada pihak yang membutuhkan, dan bank akan memperoleh imbalan yang disebut bunga.
5. Pemberi kredit adalah pihak yang memberikan pinjaman. Awalnya, pinjaman diberikan dalam bentuk uang perak atau emas yang diperoleh

¹¹Zainal Asikin, *op.cit.*, h. 28.

¹²Zainal Asikin, *op.cit.*, h. 29.

dari simpanan pemegang rekening. Saat ini, bank tidak lagi memberikan pinjaman dalam bentuk fisik perak atau emas, melainkan dalam bentuk sertifikat perak atau emas yang mewakili kepemilikan perak atau emas yang disimpan pada bank. Walaupun demikian, apabila dikehendaki, sertifikat dapat ditukarkan dengan perak atau emas yang ada di bank. Sertifikat sebagai bukti kepemilikan kedua perak atau emas tersebut bisa menjadi alat pembayaran di dalam masyarakat umum.¹³

Bank dapat menaikkan perkembangan ekonomi suatu negara karena bank memiliki peran dan fungsi sebagai berikut:

1. Menghimpun dana dari *Surplus Spending Unit* (SUU) dan menyediakan kredit kepada *Defisit Spending Unit* (DSU);
2. Tempat untuk menyimpan uang yang produktif dan efektif bagi rakyat;
3. Memfasilitasi pembayaran dengan cara yang praktis dan efisien;
4. Menyediakan jaminan penyelesaian transaksi dagang melalui penerbitan *Letter of Credit* (L/C);
5. Menyediakan jaminan penyelesaian proyek melalui penerbitan bank garansi.¹⁴

Sistem perbankan di Indonesia dikenal sebagai dual banking system yang merujuk pada Ada dua jenis sistem perbankan: konvensional dan syariah. yang beroperasi secara paralel dan diatur melalui berbagai peraturan hukum yang berlaku.¹⁵

Sebelum UU Bank Indonesia 1999 lahir, BI sudah memiliki independensi dalam menjalankan tugas pengelolaan uang. Hal itu terlihat dari Pasal 7 Undang-Undang Bank Indonesia 1968 yang menyebutkan bahwa tugas utama BI adalah

¹³Dadang Husen Sobana, 2016, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, h. 15.

¹⁴*Ibid.*, h. 19.

¹⁵Trisandi P. Usanti dan Abd. Shomad, 2017, *Hukum Perbankan*, Kencana, Depok, h. 1.

membantu pemerintah menegakkan dan menjaga nilai rupiah dalam kisaran yang stabil; serta mendorong pembangunan dan produksi menjadi lancar serta memperbanyak lapangan kerja guna menaikkan ekonomi orang banyak.¹⁶

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 Pasal 29-33 (Undang-Undang Bank Indonesia Tahun 1968), tugas Bank Indonesia dalam sektor perbankan dan kredit adalah sebagai berikut:

1. Memajukan perkembangan yang sehat dalam bidang perbankan dan kredit.
2. mengawasi urusan kredit.
3. Melakukan pembinaan terhadap sektor perbankan dengan cara.
 - a. Menyelenggarakan clearing antar bank dan mengatur dan memperlancar lalu lintas pembayaran giral.
 - b. Menentukan ketentuan umum tentang solvabilitas dan likuiditas bank.
 - c. Melakukan pembimbingan kepada bank.
4. Meminta laporan dan melakukan audit terhadap aktivitas sebuah bank.
5. melaksanakan tanggung jawab utama BI, termasuk membuat rencana kredit untuk pemerintah, memutuskan tingkat suku bunga, dan menetapkan pembatasan sektor perbankan kuantitatif dan kualitatif.
6. BI memiliki kemampuan untuk memberikan kredit likuiditas kepada bank-bank.
7. Bank Indonesia memiliki wewenang untuk mengambil keputusan terkait pengeluaran dana oleh lembaga keuangan, kecuali dalam hal asuransi.¹⁷

¹⁶Ninuk Triyanti, 2003, "Pengaturan Dan Peran Bank Indonesia Dalam Memperkuat Sektor Perbankan", *Perspektif Volume VIII*, Nomor 2 Tahun 2003, April, 2003, h. 94.

¹⁷*Ibid.*, h. 94

2. Ruang Lingkup dan Sumber Hukum Perbankan

Semua masalah hukum yang berkaitan dengan industri perbankan diatur oleh bidang hukum yang dikenal sebagai hukum perbankan. Undang-undang perbankan tidak hanya mengatur praktik perbankan tetapi juga kegiatan bank dan organisasi keuangan lainnya, serta topik terkait lainnya. industri perbankan juga mencakup kegiatan usaha, struktur kelembagaan, prosedur, dan metode pelaksanaan kegiatan usaha tersebut.¹⁸

Lingkup yang diatur oleh hukum perbankan meliputi:

1. Asas perbankan, seperti keefektifan, kesehatan bank, norma efisiensi, tujuan dan maksud dari lembaga perbankan, profesionalisme pelaku perbankan, hubungan, kewajiban dan hak bank;
2. Pihak yang tercakup dalam pengaturan hukum perbankan meliputi pelaku di sektor perbankan, termasuk direksi, karyawan, dewan komisaris, dan pihak terafiliasi. Selain itu, hukum perbankan juga mengatur berbagai bentuk badan hukum pengelola, seperti koperasi, perseroan terbatas, dan perusahaan daerah. Terkait kepemilikan, baik swasta maupun kepemilikan oleh pemerintah juga termasuk dalam ruang lingkup pengaturan hukum perbankan.;
3. Terdapat kaidah-kaidah khusus dalam hukum perbankan yang bertujuan untuk mengatur perlindungan kepentingan umum terkait dengan kegiatan perbankan. Kaidah-kaidah tersebut mencakup regulasi terkait persaingan usaha, perlindungan nasabah, pencegahan persaingan yang tidak sehat, dan aspek lainnya yang melindungi kepentingan masyarakat secara umum dalam konteks perbankan;
4. Dalam hukum perbankan terdapat pengaturan terkait struktur organisasi yang terkait dengan sektor perbankan, termasuk Bank Sentral, keberadaan Dewan Moneter, dan entitas-entitas terkait lainnya.;

¹⁸Zainal Asikin, *op.cit.*, h. 19.

5. Hukum perbankan juga mencakup aspek yang berkaitan dengan pengamanan tujuan yang ingin dicapai oleh bisnis bank, seperti pemberian insentif, penerapan sanksi, penyelesaian melalui pengadilan, praktik perbankan yang berhati-hati, dan hal-hal lainnya.¹⁹

Sebagaimana diketahui bahwa didalam Hukum dikenal beberapa sumber hukum yaitu:

1. Undang-undang (dalam arti materiil dan formil); 2. Yurisprudensi 3. Hukum Tidak Tertulis; 4. doktrin; 5. traktat

Berikut peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sumber hukum perbankan di Indonesia.

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang kemudian diubah oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, merupakan dokumen hukum yang berlaku di Indonesia. Perubahan tersebut tidak melibatkan penghapusan atau penggantian seluruh pasal yang ada dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, tetapi hanya dilakukan perubahan dan penambahan pada beberapa pasal yang dianggap penting;

Dalam Undang-undang 10 Tahun 1998 ini Pasal 1 angka 11 diatur definisi Kredit;

Pasal 1 angka 12 dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 juga mengandung definisi Pembiayaan yang didasarkan pada Prinsip Syariah;

Melakukan pengiriman uang, baik untuk kepentingan nasabah maupun untuk kepentingan sendiri, merupakan salah satu kegiatan Bank Umum yang diatur dalam Pasal 6 huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992.

Pasal 43 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 mengatur bahwa dalam perselisihan perdata antara nasabah dan bank, direksi bank terkait dapat

¹⁹Zainal Asikin, *op.cit.*, h. 20.

memberikan informasi kepada pengadilan mengenai kondisi keuangan nasabah dan keterangan lain yang relevan dengan permasalahan tersebut.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang telah mengalami perubahan dan penyempurnaan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, kemudian mengalami perubahan lagi melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Selanjutnya, perubahan tersebut disahkan sebagai Undang-Undang melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia;²⁰

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 Pasal 1 angka 6, mengatur mengenai definisi Sistem Pembayaran.

Dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, diberikan definisi mengenai peraturan Bank Indonesia.

Dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, dijelaskan pengertian kebijakan moneter.

Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 mengatur pengertian tentang satuan mata uang Rupiah, sedangkan ayat 2 mengatur pengertian tentang Uang Rupiah.

Pada Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 mengatur mengenai penggunaan uang yaitu, setiap kegiatan yang memakai uang, memiliki tujuan pembayaran atau kewajiban yang harus dilaksanakan di NKRI wajib menggunakan mata uang rupiah.

²⁰Zainal Asikin, *op.cit.*, h. 21.

Berdasarkan Pasal 2 ayat 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999, setiap individu yang berada di NKRI tidak diperbolehkan menolak menerima mata uang rupiah sebagai bentuk pembayaran atau pemenuhan kewajiban yang harus dilakukan dengan menggunakan uang.

Menurut Pasal 2 ayat 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999, pengecualian terhadap ketentuan yang disebutkan dalam ayat (3) dapat diberikan untuk keperluan transaksi di daerah atau tempat tertentu. Hal ini berlaku jika transaksi tersebut dilakukan atau kewajiban yang harus dipenuhi dalam valuta asing yang telah disepakati secara tertulis.

Pasal 3 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 menetapkan larangan membawa uang rupiah dalam jumlah tertentu masuk dan keluar wilayah NKRI, kecuali dengan izin dari BI.

Pasal 16 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 mengatur tentang wewenang BI dalam mengatur sistem kliring antar bank untuk mata uang asing atau rupiah.

Penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank dalam mata uang asing mata atau uang rupiah ada dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999.

Kewenangan BI dalam menetapkan harga, macam, ciri uang yang akan dikeluarkan, tanggal berlakunya sebagai alat pembayaran yang sah, bahan yang digunakan, dan kewennagan untuk menmpereadar dan mengeluarkan uang rupiah serta mencabutnya diatur dalam Pasal 19 dan 20 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999.

Di dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 juga menjelaskan bahwa BI tidak memberikan ganti atas uang yang musnah atau hilang karena hal apapun.

Di dalam Pasal 23 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 juga menjelaskan mengenai penyabutan dan penarikan uang rupiah oleh Bank Indonesia.

3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, kemudian mengalami perubahan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004, dan akhirnya disahkan menjadi Undang-undang melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 2009.

Didalam Pasal 17 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 mengatur mengenai pembayaran klaim penjaminan.

4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;

Kewenangan UUS (Unit Usaha Syariah) dan Bank Syariah untuk menghimpun dana sosial melalui wakaf tunai dan selanjutnya menyerahkannya kepada pengelola wakaf sesuai dengan preferensi pemberi wakaf diatur dalam Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 .

Usaha Bank Umum yang dimaksud dengan pemindahan uang diatur dalam Pasal 19 huruf n Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah untuk kepentingan nasabah atau kepentingannya sendiri.

Pasal 20 huruf g dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 juga mengatur salah satu tugas bank umum syariah, yaitu melakukan penerbitan, perdagangan, dan penawaran surat berharga jangka pendek sesuai dengan Prinsip Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang.

Pasal 21 huruf d dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 mengatur kegiatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, yang meliputi transfer dana baik untuk kepentingan internal maupun kepentingan nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang terdapat di Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah.

Pasal 46 dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 mengatur beberapa peraturan terkait pertukaran informasi antar bank. Dalam konteks ini, direksi bank memiliki kewenangan untuk memberikan informasi mengenai kondisi keuangan nasabahnya kepada bank lain.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank;

Dalam Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999, mengatur mengenai pengertian Merger.

Dalam Pasal 1 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999, mengatur mengenai pengertian Konsolidasi.

Dalam Pasal 1 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999, mengatur mengenai pengertian Akuisisi.

Syarat-syarat merger, konsolidasi, dan akuisisi diatur dalam Pasal 3-10 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999.

6. Peraturan Bank Indonesia Nomor B/26/PBI/2006 tanggal 8 November 2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat;

Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor B/26/PBI/2006, mengatur mengenai pengertian Bank Perkreditan Rakyat.

7. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/1/PBI/2009 tanggal 27 Januari 2009 Tentang Bank Umum²¹

Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/1/PBI/2009 tentang Bank Umum, diberikan definisi mengenai pengertian Bank.

Di dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/1/PBI/2009 tentang Bank Umum dalam Pasal 1 angka 7 mengatur mengenai pengertian Kegiatan Pelayanan

²¹Zainal Asikin, *op.cit.*, h. 22.

Kas, yang termasuk di dalamnya adalah: a. Kas Keliling; b. Payment Point; c. Perangkat Perbankan Elektronik.

Pasal 7 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia mengatur mengenai tujuan BI, yang mencakup pencapaian kestabilan nilai rupiah dan menjaga kestabilan nilai rupiah.

Dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia mengatur mengenai tugas Bank Indonesia yaitu a. melaksanakan dan menetapkan kebijakan moneter; b. menjaga dan mengatur kelancaran sistem pembayaran; c. mengawasi dan mengatur Bank.

Pasal 9 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia mengatur beberapa ketentuan, termasuk larangan bagi pihak lain untuk campur tangan dalam pelaksanaan tugas BI sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 8. BI memiliki kewajiban untuk mengabaikan dan menolak campur tangan dari pihak manapun dalam upaya menjalankan tugasnya.

3. Pengertian dan Manfaat Uang Elektronik

E-money pada dasarnya adalah mata uang tanpa bentuk, dengan saldo berasal dari dana yang diberikan kepada penerbit dan disimpan secara digital pada chip atau server yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran non tunai ke bisnis yang bukan penerbit *e-money*.²²

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik, Pasal 1 ayat 3, Uang Elektronik merupakan suatu alat transaksi yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Uang Elektronik diterbitkan dengan menggunakan dana yang telah diserahkan kepada pihak penerbit.;

²²Suharni, 2018, "Uang Elektronik (*E-Money*) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Dan Perubahan Sosial", *Jurnal Spektrum Hukum Volume 15*, Nomor 1 Tahun 2018, April, 2018, h. 15

- b. Server, chip, atau program perangkat lunak akan secara digital menyimpan jumlah uang yang disimpan;
- c. Nilai mata uang digital yang dikelola penerbit tidak memiliki karakteristik sebagai tabungan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang perbankan yang berlaku.

Saat ini, terjadi kemajuan inovasi dalam alat Transaksi elektronik berbasis kartu telah berkembang menjadi format yang lebih ramah pengguna. *E-money*, salah satu jenis metode pembayaran, sedang aktif bermunculan di Indonesia. Secara sederhana, *e-money* diartikan sebagai suatu instrument alat transaksi dalam bentuk digital atau elektronik dimana nilai uang tersimpan dalam suatu media elektronik tertentu.

Internet telah mengalami perkembangan yang pesat dan signifikan, baik dalam hal jumlah pengguna maupun nilai bisnis yang terkait. Para pelaku bisnis mencoba memanfaatkan kemajuan ini sebagai strategi pemasaran baru. Di dalam lingkungan internet, tersedia berbagai jenis layanan dan produk, mulai dari lagu dan perangkat lunak hingga layanan perbankan. Untuk mendukung pembayaran dalam dunia digital ini, diperlukan teknologi transaksi yang sesuai²³. Salah satu teknologi pembayaran yang digunakan adalah *e-money*.

Penggunaan *e-money* sebagai suatu alat transaksi dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Menyediakan kemudahan dan kelancaran dalam proses transaksi pembayaran.
2. Tidak lagi menghadapi masalah kembalian uang dalam bentuk permen atau sejenisnya karena ketersediaan kembalian yang terbatas.
3. Bermanfaat untuk transaksi massal seperti parkir, tol, dan lain-lain.

²³ Abdul Halim Barkatullah, 2017, *Hukum Transaksi Elektronik*, Nusa Media, Bandung, h.74.

Beberapa revisi terhadap Peraturan Bank Indonesia mengenai Uang Elektronik meliputi: 1. Perubahan Pertama Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014; 2. Perubahan Kedua Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/PBI/2016; dan 3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam menjawab masalah melalui pendekatan hukum, dengan meneliti undang-undang dan regulasi terkait yang berkaitan dengan isu yang sedang dibahas²⁴, Pendekatan konseptual juga digunakan dengan mempelajari doktrin yang berkembang dalam bidang hukum²⁵. Metodologi penelitian hukum normatif atau doktrinal digunakan dalam penelitian ini, di mana hukum didefinisikan sebagai isi undang-undang atau sebagai norma dan pedoman yang memandu perilaku manusia. Penulis mencantumkan undang-undang atau teks yang mencakup konsep yang terkait dengan perbankan dan uang elektronik.

2. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan yang memiliki kewenangan dan ciri-ciri resmi disebut sebagai bahan hukum primer. Naskah resmi yang digunakan dalam pembuatan undang-undang, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan dianggap sebagai bahan hukum primer.²⁶. Bahan hukum primer yang terkait dengan penelitian ini yaitu:

²⁴Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cet.XII, Prenadamedia Group, Jakarta, h. 133

²⁵*Ibid.*, h. 135

²⁶*Ibid.*, h. 181

- a. Undang Undang Dasar 1945;
- b. Undang Undang nomor 13 Tahun 1968 Tentang Bank Sentral;
- c. Undang Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan;
- d. Undang Undang 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah;
- e. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
- f. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan;
- g. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
- h. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia;
- i. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- j. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- k. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang;
- l. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen;
- m. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia;
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Merger, Konsolidasi Dan Akuisisi Bank;
- o. Peraturan Bank Indonesia Nomor B/26/PBI/2006 Tentang Bank Perkreditan Rakyat;

- p. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/1/PBI/2009 Tentang Bank Umum;
- q. Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik;
- r. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan;
- s. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat;
- t. KUH Perdata (BW);
- u. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/11/DIKSP Perihal : Penyelenggaraan Uang Elektronik (*Electronic Money*);

b. Bahan Hukum Sekunder

Buku dan jurnal ilmiah dianggap sebagai bahan hukum sekunder karena memuat gagasan dasar teori hukum serta pendapat para akademisi hukum yang berpengetahuan luas²⁷. Bahan hukum sekunder yang terkait dengan penelitian ini yaitu:

c. Bahan hukum Tersier

Kamus hukum, ensiklopedia, dan karya lain yang menjelaskan dan membimbing pembaca melalui hukum sekunder dan primer adalah contoh publikasi hukum tersier.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam skripsi ini, proses pengumpulan data dilakukan melalui serangkaian langkah untuk mendukung penelitian. Studi kepustakaan dilakukan untuk meneliti dokumentasi hukum primer dan sekunder. Dengan menggunakan tinjauan di

²⁷*Ibid.*,h. 182

pustaka ini, penulis dapat memperoleh manfaat berupa penemuan teori-teori dan konsep-konsep umum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

4. Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian normatif, pengelolaan data dilakukan untuk menyusun organisasi sistematis konten tertulis. Analisis data yang dilakukan bersifat kualitatif, dengan tujuan memahami, menginterpretasikan, dan mendeskripsikan realitas. Penulis menyimpulkan secara deduktif, yaitu dengan menarik kesimpulan dari detail di mana dua fakta ditemukan.

F. Pertanggung Jawaban Sistematika

Untuk memudahkan perolehan data dalam pembahasan dan penulisan skripsi ini, struktur skripsi dibagi menjadi beberapa bab dengan urutan sebagai berikut:

- Bab I** : Bab pertama membahas pendahuluan yang berisi latar belakang permasalahan yang diangkat, dan perumusan suatu masalah yakni mengenai alasan tentang penulis mengapa tertarik melakukan penelitian tersebut kemudian penulis menarik rumusan masalah sebagai batasan masalah masalah yang akan dibahas, terdapat pada tujuan yang akan dibahas yaitu manfaat penelitian yang terbagi dua yaitu : manfaat secara teoritis dan praktis serta menyajikan tinjauan pustaka yang merangkum dengan singkat dan jelas konsep yang relevan tentang topik yang akan dibahas.;
- Bab II** : Berisikan pembahasan atas rumusan masalah pertama yaitu mengenai karakteristik dari uang elektronik;
- Bab III** : Setelah menemukan karakteristik dari uang elektronik, maka nantinya akan dijadikan acuan sebagai pembahasan dari rumusan masalah kedua yaitu perlindungan hukum konsumen pengguna jasa pembayaran uang elektronik

Bab IV : Bab terakhir berfokus pada inti dari penelitian yang menawarkan kesimpulan dan rekomendasi berbasis penelitian.